

**ASIMETRI PADA *FLYPAPER EFFECT* : BUKTI EMPIRIS
PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA HASIL
PEMEKARAN DI SUMATERA**

(Skripsi)



Disusun Oleh :

DEWI PUSPITA

NPM : 1312120165

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG**

2017

**ASIMETRI PADA *FLYPAPER EFFECT* : BUKTI EMPIRIS
PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA HASIL
PEMEKARAN DI SUMATERA**

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
Pada Jurusan Akuntansi
Institut Informasi Dan Bisnis Darmajaya



Disusun Oleh :

**DEWI PUSPITA
NPM : 1312120165**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2017**



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu Perguruan Tinggi atau karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggung jawaban sepenuhnya berada di pundak saya.

Bandar Lampung, 02 Maret 2017



DEWI PUSPITA
NPM. 1312120165

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ASIMETRI PADA *FLYPAPER EFFECT* :
BUKTI EMPIRIS PEMANFAATAN DANA
ALOKASI UMUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN
DI SUMATERA

Nama Mahasiswa : DEWI PUSPITA

NPM : 1312120165

Jurusan : Akuntansi



Ketua Jurusan Akuntansi,



HALAMAN PENGESAHAN

Telah diselenggarakan Sidang ASIMETRI PADA *FLYPAPER EFFECT* :
BUKTI EMPIRIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN DI
SUMATERA. Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh
gelar SARJANA EKONOMI, bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **DEWI PUSPITA**

NPM : 1312120165

Jurusan : Akuntansi

Dan telah dinyatakan LULUS oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda tangan</u>
1. Anik Irawati, S.E., M.Sc.	- Ketua Sidang	
2. Jaka Darmawan, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPAi.	- Anggota	

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI Darmajaya


Dr. R.Z. Abdul Aziz, M.T
NIK: 01050904

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Februari 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Dewi Puspita
2. Tempat Tanggal Lahir : Bumi Dipasena, 25 Desember 1994
3. Alamat : Gayau Sakti RT 07/RW 001, Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah
4. Domisili : Bandar Lampung
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Nikah
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Suku : Jawa
10. Telepon : 0822-6912-4675
11. Email : dewipuspita340@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2007) Lulus SD N 01 Bumi Dipasena Makmur
2. (2010) Lulus MTs Jauharotul Muallimin Gayau Sakti
3. (2013) Lulus MA Jauharotul Muallimin Gayau Sakti
4. (2017) Lulus S1 Akuntansi IBI Darmajaya Bandar Lampung

Bandar Lampung, 02 Maret 2017

Dewi Puspita
NPM.1312120165

PERSEMBAHAN

- *Allah SWT yang telah memberiku kekuatan untuk menyelesaikan amanah ini.*
- *Bapak dan Ibu tercinta, yaitu Bapak Badrun dan Ibu Mas'Amah, motivator terbesar dalam hidupku. Ku tahu kau berharap dalam doamu, kutau kau berjaga dalam langkahmu, dan ku tahu selalu ada cinta dalam senyummu.*
- *Adikku tercinta, Anisa Noviana, yang memberiku dorongan, semangat dan doa untuk setiap jalanku.*
- *Almamater tercinta Institut Informatika & Bisnis Darmajaya yang telah mendewasakan dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.*

MOTTO

“I CAN IF I THINK I CAN”

**ASIMETRI PADA *FLYPAPER EFFECT* : BUKTI EMPIRIS
PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA HASIL
PEMEKARAN DI SUMATERA**

OLEH

DEWI PUSPITA

1312120165

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan terjadinya asimetri informasi pada *flypaper effect* di Pemerintahan Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera. *Flypaper effect* terjadi ketika tidak ada persyaratan dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah sehingga meningkatkan belanja daerah dalam proporsi yang lebih besar dibanding peningkatan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintahan kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera selama periode 2011-2014, dengan menggunakan metode pengumpulan data *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan terjadinya *flypaper effect* pada pemanfaatan DAU. Selain itu, hasil membuktikan terjadi asimetri dalam pergantian fiskal, ketika DAU meningkat pemerintah daerah membelanjakan tambahan pendapatan. Namun ketika jumlah DAU berkurang belanja daerah tidak berkurang dan pemerintah daerah mengkompensasi pengeluaran tersebut melalui tambahan pungutan pajak.

Kata Kunci : Asimetri, *Flypaper Effect*, pajak.

**THE ASYMMETRY ON FLYPAPER EFFECT: EMPIRICAL EVIDENCE
FROM THE GENERAL ALLOCATION FUND UTILIZATION AT
THE DISTRICT / CITY EXPANSION RESULTS IN SUMATRA.**

By

**Dewi Puspita
1312120165**

ABSTRACT

This reseach was aimed at provide empirical proof of occurrence of asymmetry in the flypaper effect in the District/City Government as the result of the expansion in Sumatra. The flypaper effect occurs when there is no requirement in the use of the General Allocation Fund (DAU) to the local governments to increase the local spending in a larger proportion compared to the increase of the local taxes. This research used secondary data such as the realization of the Local budget revenue and expenditure (APBD) the District/City Government as the result of the expansion in Sumatra in the period of 2011-2014, using purposive sampling technique to collect the data. The data analysis method used was multiple linear regression method. The result of this reseach proved that flypaper effect on the DAU monitoring. In addition, the result proved the case of the asymmetry in the fiscal turnover, when DAU increased local government may spend additional revenue. but when the number of DAU reduced spending is not reduced and the local governments compensate these expenses through additional taxation.

keywords: Asymmetry, flypaper-effect, tax.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala nikmat iman, islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* teriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.

Judul skripsi ini adalah “ASIMETRI PADA *FLYPAPER EFFECT* : BUKTI EMPIRIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI UMUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN DI SUMATERA”.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang tak hanya lisan, kepada :

1. Bapak Andi Desfiandi, S.E., M.A Selaku Ketua Yayasan Alfian Husin Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
2. Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, M.B.A., M.Sc Selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. Bapak Dr. R.Z. Abdul Aziz, M.T Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
4. Bapak Rony Nazar, S.E, Selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bnadar Lampung.
5. Bapak Muprihan Thaib, S.Sos., M.M, Selaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Bisnis Intitut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
6. Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

7. Bapak Taufik, S.E., M.S.Ak., Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen beserta Staff Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
9. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya serta do'a yang tulus demi keberhasilanku.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah memberi semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT menilai ibadah yang penulis kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Aamiin.

Bandar Lampung, 02 Maret 2017
Penyusun,

Dewi Puspita
1312120165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.3. Perumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Masalah	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Teori Signal	10
2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	10
2.3. Pendapatan Pajak Daerah	11
2.4. Dana Alokasi Umum (DAU).....	14
2.5. Belanja Daerah	13
2.6. Penelitian Terdahulu.....	16

2.7.	Kerangka Pemikiran	17
2.8.	Bangunan Hipotesis.....	18
2.8.1.	Terjadi <i>Flypaper Effect</i>	18
2.8.2.	Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Prediksi Belanja Daerah.....	19
2.8.3.	Asimetri pada <i>Flypaper Effect</i>	19
2.8.4.	Terdapat perbedaan antar daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU	20

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis dan Sumber Data	21
3.2.	Metode Pengumpulan Data	21
3.3.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	21
3.3.1.	Populasi	21
3.3.2.	Sampel	22
3.4.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	23
3.5.	Metode Analisis Data	24
3.5.1.	Analisis Deskriptif.....	24
3.5.2.	Analisis Asumsi Klasik	24
3.6.	Pengujian Hipotesis	27
3.6.1.	Pengujian Regresi Linier dengan Variabel <i>Dummy</i> : Variabel Independen Periode Berjalan	28
3.6.2.	Pengujian Regresi Linier dengan Variabel <i>Dummy</i> : Variabel Independen Periode Sebelumnya.....	28
3.6.3.	Koefisien Determinasi (R^2).....	28
3.6.4.	Uji F (<i>F Test</i>)	29
3.6.5.	Uji t (Uji Independent Sample t-Test)	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Deskripsi Data	31
4.1.1.	Deskripsi Objek Penelitian	32

4.1.2.Deskripsi Variabel Penelitian	33
4.2. Hasil Analisis Data	34
4.2.1.Analisis Statistik Deskriptif.....	34
4.2.2.Pengujian Asumsi Klasik.....	36
4.3. Hasil Pengujian Hipotesis.....	40
4.3.2.Pengujian Regresi Linier dengan Variabel <i>Dummy</i> : Variabel Independen Periode Berjalan	41
4.3.3.Pengujian Regresi Linier dengan Variabel <i>Dummy</i> : Variabel Independen Periode Sebelumnya (Lag 1)	42
4.3.4.Koefisien Determinasi	43
4.3.5.Uji Statistik F.....	44
4.3.6.Uji t (Uji Independent Sample t-Test)	45
4.4. Pembahasan	46
4.4.1. <i>Flypaper Effect</i>	46
4.4.2.Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Prediksi Belanja Daerah.....	47
4.4.3.Asimetri pada <i>Flypaper Effect</i>	48
4.4.4.Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada daerah DAU mengalami peningkatan dan penurunan.....	49
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
4.5. Simpulan.....	51
4.6. Keterbatasan Penelitian	52
4.7. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	23
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel.....	31
Tabel 4.2 Daftar Sampel Penelitian.....	32
Tabel 4.3 Daftar Pengukuran Variabel.....	33
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif.....	34
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif <i>Dummy</i> DAU.....	35
Tabel 4.6 Uji Normalitas Sebelum logaritma 10.....	36
Tabel 4.7 Uji Normalitas Setelah logaritma 10.....	37
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas.....	38
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi.....	39
Tabel 4.10 Analisis Regresi.....	40
Tabel 4.11 Uji Regresi Linier tanpa <i>lag 1</i>	41
Tabel 4.12 Uji Regresi Linier dengan <i>lag 1</i>	42
Tabel 4.13 Hasil Uji R Square.....	43
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>F</i>	44
Tabel 4.15 Uji t (Uji Independent Sample t-Test).....	45

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.	18
Gambar 4.1 <i>Scatter plot</i> uji heteroskedatisitas	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan secara merata disegala aspek kehidupan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memberikan kebijakan yang dipandang sangat demokratis yaitu kebijakan otonomi daerah. Adapun otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di era otonomi daerah, perubahan UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004, kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Salah satu bentuk otonomi daerah adalah pemekaran wilayah atau desentralisasi. Dimana pemekaran daerah merupakan sebuah aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerahnya sendiri dimana daerah otonom baru mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahan agar rentang kendali dapat mempercepat proses pembangunan di daerah yang dimekarkan. Pada dasarnya pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berencana dan juga perlu didukung oleh semua unsur masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh pemerintah melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Semua aturan diatas menjadi sangat penting karena membawa dampak yang sangat mendasar pada kehidupan tata pemerintahan dan tata keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya nanti tentu akan membawa perubahan yang mendasar juga pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Pratama, 2014).

Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi dan kebutuhan daerah dan sumber daya serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan. Keadaan ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, dan juga menetapkan transfer dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (Kurniawan, 2013)

Akan tetapi, sampai saat ini sebagian daerah otonom baru masih mengalami kesulitan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena minimnya sumber daya dan belum tergalinya potensi pendapatan. Untuk masalah keuangan, daerah otonom baru masih bergantung pada bantuan keuangan dari daerah induk dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan penambahan daerah otonom baru justru membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurut Abdullah M.A. (2011), berbagai konsekuensi biaya yang harus dibebankan pada APBN dan APBD untuk pemekaran daerah kabupaten dan kota, adalah sebagai berikut :

1. Porsi Dana Alokasi Umum (DAU) tiap daerah semakin berkurang,
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) pra-sarana untuk daerah meningkat dalam APBN,
3. Pembiayaan sarana-sarana pelayanan umum,
4. Dana Pendamping Daerah, pemekaran wilayah selain menambah beban terhadap APBN, membebani juga APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Dana Bantuan Pemerintah Provinsi. Pemerintah provinsi berkewajiban membantu dan membiayai pembangun di Kabupaten dan Kota melalui dana hasil dan dana bantuan.

Beban biaya akibat pemekaran daerah yang harus ditanggung oleh APBN akan semakin besarnya porsinya dari tahun ke tahun apabila laju pemekaran daerah tidak dapat dihentikan. Pemekaran daerah yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi daerah akan semakin menambah beban pemerintah pusat untuk mencukupi biaya transfer dari daerah otonomi baru. (Tennini, 2013)

Permasalahan lain dalam pemekaran daerah adalah dengan terbentuknya pemekaran daerah maka akan mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat. Dengan semakin banyaknya daerah pemekaran baru maka setiap tahun jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin tinggi. Hal ini menyebabkan jumlah Belanja Negara setiap tahun meningkat, apabila pertumbuhan belanja negara lebih tinggi dari pertumbuhan Pendapatan Negara, akan mempersempit kapasitas fiskal pemerintah pusat. Dan semakin banyak daerah pemekaran baru, juga menyebabkan porsi DAU yang diterima pemerintah daerah akan berkurang dari tahun ke tahun berikutnya.

Pemerintah Indonesia menganut prinsip keseimbangan fiskal dimana selain mendapat dana transfer pusat, pemerintah daerah mengandalkan pendapatan asli daerahnya terutama dari pendapatan pajak daerah. Apabila pemerintah daerah menerima peningkatan DAU dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU, namun apabila DAU mengalami penurunan pemerintah daerah tidak berusaha menurunkan

kenaikan belanjanya, untuk menutupinya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan pajak daerah. Artinya peningkatan pemberian DAU dari tahun sebelumnya dapat mengakibatkan pemerintah daerah kurang maksimal meningkatkan potensi pendapatan pajaknya. (Junaidi, 2012)

Perilaku asimetris dapat dilihat saat pemerintah mendapatkan transfer pemerintah berupa DAU yang lebih kecil dari periode sebelumnya maka belanja pemerintah akan turun. Penurunan belanja yang tidak sebanding dengan penurunan PAD, belanja pemerintah justru lebih dari rendah dibanding dengan penurunan PAD. Kemudian pada saat pemerintah meningkatkan belanjanya, namun tidak disertai dengan peningkatan PAD yang signifikan. Timbulnya perilaku asimetris pada umumnya dikarenakan pemerintah daerah menginginkan agar besarnya DAU yang diterima akan tetap, atau dapat terus bertambah dari satu periode ke periode sebelumnya. (Maimunah, 2006)

Tingginya belanja daerah perlu dimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi. Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik. Kebijakan ini menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah karena akhirnya pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk lebih efisien dan efektif. Di satu sisi daerah hasil pemekaran tidak banyak yang mampu berkembang dan masih bergantung pada dana tranfer pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian pada suatu daerah menjadi sangat rendah. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu, Junaidi (2012) tentang asimetri pada *flypaper effect*: bukti empiris pemanfaatan dana alokasi umum pada pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi perilaku asimetri pemerintah daerah dalam pergantian fiskal, ketika DAU meningkat pemerintah daerah membelanjakan tambahan pendapatan, namun ketika jumlah DAU berkurang belanja daerah tidak

berkurang dan pemerintah daerah mengkompensasi pengeluaran tersebut melalui tambahan pungutan pajak. Penurunan tranfer dana alokasi umum mengakibatkan pemerintah daerah meningkatkan pajak daerahnya untuk mendanai belanja pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti replikasi adalah peneliti mengganti objek penelitian ini yaitu pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran di Sumatera, dikarenakan wilayah pemekaran banyak yang masih bergantung pada daerah induk dan Sumatera salah satu daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan. Pantai barat Sumatera (dari jalur Banda Aceh – Sibolga – Padang – Bengkulu - Lampung Barat) merupakan jalur yang terkenal sebagai rawan bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami, dan juga pembangunan belahan pesisir barat lebih tertinggal dibanding belahan pesisir timur. Penelitian ini menggunakan 4 tahun pengamatan yaitu periode 2011-2014 dikarenakan pada tahun 2015 Direktorat Jendral Kementerian Keuangan belum mempublikasikan Laporan Realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan. Oleh sebab itu, peneliti ingin membuktikan secara empiris apakah dengan pergantian objek penelitian hasil penelitian akan tetap konsisten dengan penelitian sebelumnya, atau bahkan akan memberikan hasil yang baru.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Asimetri pada *Flypaper Effect* : Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera.”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarah dalam pembahasan, maka penulis memilih ruang lingkup penelitian, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera yang mempublikasikan laporan APBD tahun 2011-2015 dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yaitu, www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera?
2. Apakah terjadi *flypaper effect* pada prediksi belanja daerah di Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera pada tahun 2011-2014?
3. Apakah terjadi asimetri pada *flypaper effect* di Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera pada tahun 2011-2014?
4. Apakah terdapat perbedaan antara daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU?

1.4 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera.
2. Untuk memberikan bukti empiris terjadi *flypaper effect* pada prediksi belanja daerah di Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera pada tahun 2011-2014.
3. Untuk memberikan bukti empiris jika terjadi asimetri pada *flypaper effect* di Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera pada tahun 2011-2014.
4. Untuk memberikan bukti empiris terdapat perbedaann antara daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, untuk memperkuat penelitian sebelumnya, bekeanan dengan adanya asimetri pada *flypaper effect* pemanfaatan dana alokasi umum secara empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra.
2. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai sumbangan bahan kepustakaan khususnya pada Fakultas Bisnis Ekonomi Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. Bagi pemerintah daerah, memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
4. Bagi pihak lain, sebagai bahan yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, serta hasil penelitian. Dalam bagian ini juga dikemukakan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data dan sumber data, penentuan sampel, metode pengumpulan, variabel penelitian dan definisi operasional serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai analisis dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta saran-saran yang berguna bagi pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Signal

Teori signal (*signaling theory*) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya manajemen memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Holthausen dan Watts (dikutip dari Jama'an, 2008) menjelaskan bahwa manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme untuk menghasilkan laba yang lebih berkualitas.

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan *agent*, sehingga *agent* tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai prinsipal dan pemerintahan sebagai agen. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk lat monitoring untuk mengurangi *agency cost*.

Teori *signaling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih detail dalam pengungkapan. Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat, baik sebagai bentuk

pertanggungjawaban maupun bentuk promosi untuk tujuan politik (Evans, J, Patton (1987), dalam Hendriyani (2015).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun karakteristik APBD adalah sebagai berikut :

- a. Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawab pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Anggaran pendapatan, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan lain-lain yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Belanja dikelompokkan menjadi belanja aparatur, belanja layanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak tersangka.

- c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah inilah yang mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Terjadinya surplus apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, sedangkan defisit apabila pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Adanya surplus anggaran kemudian dapat dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) dan sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah (Hartati, 2009).

2.3 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Adapun jenis-jenis pajak adalah sebagai :

- a. Pajak Provinsi terdiri 5 jenis, yaitu :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. PBB Perdesaan dan Perkotaan;
 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2014, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada :

- a) Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
- b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh kementerian keuangan atau surat edaran menteri keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2014.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD tahun Anggaran 2015.

2.5 Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Adapun jenis-jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang

akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja pegawai dipergunakan untuk :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI.
2. Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap.
3. Belanja Gaji dan tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara.

2. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas:

- a. Belanja tanah
- b. Belanja peratan dan mesin
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
- e. Belanja aset tetap lainnya
- f. Belanja aset lainnya.

4. Belanja Bunga Utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.

5. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

6. Belanja Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan hibahkan ke daerah.

7. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

8. Belanja Lain-Lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian Terdahulu	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maimunah (2006)	<i>Flypaper effect</i> pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera	X1 : DAU X2 : PAD X3 : Kemampuan Daerah Y : Belanja Daerah	Besarnya DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi besarnya PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.
2	Junaidi (2012)	Asimetri pada <i>flypaper effect</i> : bukti empiris pemanfaatan DAU pada pemerintah daerah di Indonesia	X1 : DAU X2 : Pendapatan Pajak Daerah Y : Belanja daerah	Penelitian ini berhasil menyimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan DAU terhadap belanja daerah, sedangkan variabel <i>tax</i> maupun <i>dummy</i> DAU tidak signifikan berpengaruh terhadap belanja daerah.
3	Sri Wahyuni (2015)	<i>Flypaper Effect</i> pada dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di	X1 : DAU X2 : PAD Y : Belanja Daerah	Secara simultan, DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Dan secara parsial, DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

		Provinsi Sumatera Utara		
4	Satrya Kurniawan (2013)	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja langsung dan produk domestik regional bruto (PDRB) (Studi pada kabupaten/kota di propinsi Lampung)	X = PAD Y1 = Belanja Langsung Y2 = PDRB	PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, dan PDRB.
5	Alan Rizky Pratama (2014)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (Studi empiris pada seluruh kabupaten di propinsi Lampung)	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DBH Y : Belanja Modal	DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan PAD dan DBH tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

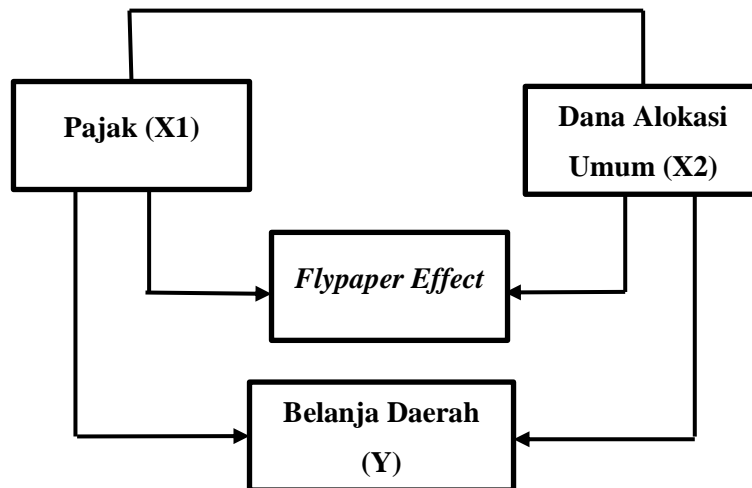
Sumber : olah data penulis, 2017

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Selain mendapat dana transfer pusat berupa DAU untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah mengandalkan pendapatan asli daerahnya terutama dari pendapatan pajak daerah. Apabila pemerintah daerah

menerima peningkatan DAU dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU, namun apabila DAU mengalami penurunan pemerintah daerah tidak berusaha menurunkan kenaikan belanjanya, untuk menutupinya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan pajak daerah. Artinya peningkatan pemberian DAU dari tahun sebelumnya dapat mengakibatkan pemerintah daerah kurang maksimal meningkatkan potensi pendapatan pajaknya.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pendapatan Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.

2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Terjadi *Flypaper Effect*

Fenomena *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak/boros dengan menggunakan dana transfer yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan pendapatan pajak daerahnya. Maimunah (2006), menyatakan untuk dapat dikatakan telah terjadi *flypaper effect* maka hasil yang diperoleh haruslah menunjukkan (1) nilai

koefisien DAU lebih besar dari koefisien PAD dan keduanya signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan. Untuk menentukan terjadi *flypaper effect* maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H1: Terjadi *flypaper effect*.

2.8.2 Pengaruh *Flypaper Effect* pada Prediksi Belanja Daerah

Pemerintah daerah penerima DAU bereaksi secara asimetri atas peningkatan nilai DAU yang diterima. Bila DAU meningkat dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja lebih besar dari kenaikan belanjanya. Saat pemerintah mendapatkan transfer pemerintah berupa DAU yang lebih kecil dari periode sebelumnya maka belanja pemerintah akan turun. Timbulnya perilaku asimetris pada umumnya dikarenakan pemerintah daerah menginginkan agar besarnya DAU yang diterima akan tetap, atau dapat terus bertambah dari satu periode ke periode sebelumnya.

Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Maka hipotesis untuk menguji hubungan DAU sebagai prediksi Belanja Daerah periode berikutnya adalah:

H2 : Terjadi *flypaper effect* pada prediksi belanja daerah

2.8.3 Asimetri pada *Flypaper Effect*

Terdapat perbedaan pengakuan belanja dari Kemendagri no. 29 tahun 2001/Permendagri no. 13 tahun 2006. Belanja rutin dan pembangunan pada Kepmendagri diidentikan dengan belanja pegawai, barang dan jasa serta modal pada Permendagri. Selain itu pada Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 menggantikan PP no. 24 tahun 2005 telah ditetapkan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan akrual basis mulai tahun 2011. Diharapkan dengan dapat diperoleh kesimpulan ada tidaknya asimetri pada *flypaper effect* pemanfaatan dana alokasi umum (Junaidi, 2012). Maka hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

H3 : Terjadi asimetri pada *flypaper effect*

2.8.4 Terdapat perbedaan antar daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU

Ada dua faktor utama yang menentukan besarnya transfer DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faktor pertama adalah kebutuhan daerah (*needs*). Faktor yang kedua adalah faktor kemampuan finansial daerah yang merupakan kemampuan dasar dalam membiayai belanja daerah yang berasal dari PAD dan DBH. Untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

H4 : Terdapat perbedaan antara daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, karena data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Sumber data dari dokumen Laporan Relisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Pulau Sumatera Tahun 2011-2014 yang diperoleh dari website/situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya yang sudah ada sebelumnya yang sudah ada sebelum melakukan penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, abstrak yang berkaitan dengan penelitian. Tahap kedua adalah studi dokumentasi, dengan mengumpulkan data berupa laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian melalui media internet (www.djpk.kemenkeu.go.id) dengan cara *men-download* laporan APBD yang dibutuhkan.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Atau adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2008). Data pemerintahan yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera Tahun 2011 sampai dengan 2015.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti/diobservasi dan dianggap dapat menggambarkan keadaan atau ciri populasi. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *non probability sampling*, dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgment*) tertentu atau jatah (*quota*) tertentu (Jogiyanto, 2011).

Adapun kriteria yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten maupun kota di Sumatera dan merupakan hasil pemekaran pada kurun waktu 2000-2011.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera yang konsisten menyampaikan laporan realisasi APBD lengkap dengan data belanja daerah, pajak daerah dan danabagi hasil pajak, serta dana alokasi umum tahun 2011-2014 dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu, www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian dan definisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau memberikan variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur. Dilihat dari sudut pandang hubungannya variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2011). Dalam penelitian ini variabel independen terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah disimbolkan dengan “XI”, Dana Alokasi Umum disimbolkan dengan “X2”, dan *Dummy* DAU disimbolkan dengan “X3”.

2. Variabel Dependen

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah disimbolkan dengan “Y”.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi
Independen	Pendapatan Pajak daerah (XI)	Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing
Independen	Dana Alokasi Umum (X2)	Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum dimaksudkan agar pemerintah daerah terdorong untuk secara intensif menggali sumber-sumber penerimanya, serta dalam rangka menjamin kinerja fiskal

		pemerintah daerah.
Independen	<i>Dummy</i> DAU (X3)	Nilai DAU yang mengalami perubahan menurun dari tahun sebelumnya 1 dan yang mengalami perubahan menaik dari tahun sebelumnya 0.
Independen	Belanja Daerah (Y)	Pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Belanja daerah ini dimaksudkan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sumber : olah data penulis, 2017

3.5 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi program SPSS Versi 20 sebagai alat untuk menguji data tersebut dan kemudian dianalisis dengan analisis sebagai berikut :

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang tersedia sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan antara Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, *dummy* DAU, dan Belanja Daerah pada daerah Kota/Kabupaten Hasil Pemekaran di Sumatera.

3.5.2 Analisis Asumsi Klasik

Penggunaan analisis regresi dalam pengujian hipotesis, harus di uji terlebih dahulu apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi.

3.5.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan analisis parametrik melainkan menggunakan analisis non-parametrik.

Apabila nilai *Sig.* atau signifikansi atau nilai probabilitas yang terdapat pada kolom *Kolmogorov-Smirnov* dan kolom *Shapiro-Wilk* lebih kecil dari alpha atau tingkat kesalahan yang ditetapkan ($<0,05$), maka data yang dianalisis tersebut terdistribusi secara tidak normal.

Apabila nilai *Sig.* atau signifikansi atau nilai probabilitas yang terdapat pada kolom *Kolmogorov-Smirnov* dan kolom *Shapiro-Wilk* lebih besar dari alpha atau tingkat kesalahan yang ditetapkan ($>0,05$), maka data yang dianalisis tersebut terdistribusi secara normal. (Sudarmanto, 2013)

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan hubungan linier antara variabel independen. Uji ini digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan yang kuat antara sesama variabel independen. Jika terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen maka terdapat gejala Mutikolinearitas dan sebaliknya.

Ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel independen (multikolinearitas) dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi *Variance Inflation Factor (VIF)*. VIF dalam hal ini merupakan

suatu harga koefisien statistik yang menunjukkan pada *Collinearity*. Cara yang digunakan hanya dengan melihat apakah harga koefisien VIF untuk masing-masing variabel independen lebih besar dari 10 atau tidak. Apabila harga koefisien harga koefisien VIF untuk masing-masing variabel independen lebih besar daripada 10, maka variabel tersebut diindikasikan memiliki gejala multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Heterokedastitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model yang baik harus bebas dari masalah heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat apakah pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah residual dan sumbu X adalah X yang telah diprediksi.

Syarat dasar analisis heteroskedastisitas, sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas/menyebar, titik-titik penyebaran berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data *time series*.

Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik *Durbin Watson* mendekati angka 2, maka data dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi, dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat autokorelasi. (Rieveld dan Sunaryanto, 1994 dalam Sudarmanto, 2013)

3.6 Pengujian Hipotesis

Uji ini akan digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara variabel bebas (Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), *dummy* DAU) terhadap variabel Belanja Daerah. Penelitian ini menguji hipotesis dengan metode analisis regresi dengan dan tanpa variabel *dummy* DAU serta pengujian dengan menggunakan *lag* 1.

Pengujian pertama untuk melihat apakah nilai koefisien pajak lebih kecil dari koefisien DAU pada pengujian *lag* atau tidak. Pengujian kedua untuk mengamati apakah terjadi asimetri dalam kasus perubahan DAU baik saat DAU meningkat maupun saat DAU menurun. Pengujian selanjutnya untuk mengamati nilai koefisien DAU tahun sekarang atau tahun sebelumnya yang lebih besar mempengaruhi belanja. Pengujian selanjutnya akan melakukan uji beda antara pemerintahan daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan nilai DAU.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$BD = \alpha_{0,i} + \alpha_1 \text{Pajak}_{it} + \alpha_2 \text{DAU}_{it}$$

$$BD = \alpha_{0,i} + \alpha_1 \text{Pajak}_{it} + \alpha_2 \text{DAU}_{it} + \alpha_3 \text{DDAU}_{it}$$

$$BD = \alpha_{0,i} + \alpha_1 \text{Pajak}_{it-1} + \alpha_2 \text{DAU}_{it-1} + \alpha_3 \text{DDAU}_{it}$$

Keterangan :

BD = Belanja pemerintah daerah

Pajak = Pajak daerah dan pendapatan bagi hasil pajak

Pajak_{it} = Pajak daerah tahun sebelumnya

DAU = Dana alokasi umum

DAU_{it} = Dana alokasi umum tahun sebelumnya

DDAU = *Dummy* DAU, nilai DAU yang mengalami perubahan menurun dari tahun sebelumnya 1 dan yang mengalami perubahan menaik dari tahun sebelumnya 0.

3.6.1 Pengujian Regresi Linier dengan Variabel *Dummy*: Variabel

Independen Periode Berjalan

Analisis regresi linier dengan variabel *dummy* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu Pendapatan Pajak Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan hasil *dummy* DAU, secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat yakni belanja pemerintah daerah (Y).

3.6.2 Pengujian Regresi Linier dengan Variabel *Dummy*: Variabel

Independen Periode Sebelumnya

Analisis regresi linier dengan variabel independen seperti pajak, DAU dan *dummy* DAU periode sebelumnya terhadap belanja daerah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *lag* 1 pada variabel independen, yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas yaitu Pendapatan Pajak Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan hasil *dummy* DAU, secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat yakni belanja pemerintah daerah (Y).

3.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien. Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai *Adjusted R Square* maka akan semakin baik bagi model regresi variabel terikat juga semakin besar. Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah biasa terhadap jumlah variabel independen. Semakin banyak variabel independen ditambahkan ke dalam model maka *R Square* akan meningkat walaupun variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan ke dalam model.

3.6.4 Uji F (Kelayakan Model)

Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah model dalam penelitian layak atau tidak layak digunakan dalam menganalisis riset yang dilakukan. Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji F (Kelayakan Model). Hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan $\alpha = 5\%$ jika :

- a. $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau nilai Sig $< 0,005$ maka kesimpulan model layak.
- b. $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau nilai Sig $> 0,005$ maka kesimpulan model tidak layak (Ghozali, 2011).

3.6.5 Uji t (*Uji Independent Sample t-Test*)

Uji *Independent Sample t-Test* adalah uji untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah tidak secara signifikan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi. (Lupioyadi dan Ikhsan, 2015).

Langkah pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi apakah varian dari dua kelompok populasi dianggap sama atau tidak. Untuk membuktikannya dengan melihat pada nilai Signifikan F. Jika nilai Signifikan F $> 0,005$, berarti kedua kelompok berasal dari populasi yang sama, sebaiknya jika nilai signifikan F $< 0,05$, berarti kedua kelompok berasal dari populasi yang tidak sama.

Pengujian dilakukan dengan uji t, yaitu dengan membandingkan t tabel dan t hitung dengan $\alpha = 5\%$ jika :

- a. $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau nilai Sig $> 0,005$, maka H_0 diterima. Berarti rata-rata populasi adalah sama.
- b. $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau nilai Sig $< 0,005$, maka H_0 ditolak. Berarti rata-rata populasi adalah tidak sama.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Sumatera merupakan pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 443.065,8 km². Penduduk pulau ini sekitar 52.210.926. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Nusantara. Disebelah utara berbatasan dengan teluk Benggala, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Saat ini Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Pulau Sumatera terdiri dari 120 kabupaten dan 34 kota. Ojek penelitian ini adalah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera yang melaporkan laporan realisasi APBD di www.djpk.kemenkeu.go.id. Adapun prosedur pemilihan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1
Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kabupaten/Kota pemekaran yang ada di Sumatera	83
2.	Kabupaten/Kota pemekaran yang ada di Sumatera melakukan pemekaran sebelum 2001	(33)
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran di Sumatera yang tidak konsisten menyampaikan laporan realisasi APBD lengkap tahun 2011-2014	(5)
	Jumlah Sampel	45

Sumber : Data diolah, 2017

Dalam penelitian ini akan diteliti 45 Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2011-2014. Data keuangan tersebut antara lain Pendapatan Pajak Daerah (Pajak daerah dan Pendapatan Bagi hasil Pajak/dana bagi hasil pajak dari provinsi), Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah yang diperoleh dari *website* /situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Adapun daftar sampel yang digunakan untuk penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Sampel Penelitian

No.	Nama Kabupaten/Kota	No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kota Langsa	24	Kota Sungai Penuh
2	Kota Lhokseumawe	25	Kab. Banyuasin
3	Kab. Gayo Lues	26	Kab. Ogan Ilir
4	Kab. Aceh Barat Daya	27	Kab. OKU Timur
5	Kab. Aceh Jaya	28	Kab. Empat Lawang
6	Kab. Nagan Raya	29	Kab. Lubuk Linggau
7	Kab. Aceh Tamiang	30	Kab. Kaur
8	Kab. Bener Meriah	31	Kab. Seluma
9	Kab. Pidie Jaya	32	Kab. Mukomuko
10	Kota Subulussalam	33	Kab. Lebong
11	Kab. Pakpak Bharat	34	Kab. Kepahiang
12	Kab. Humbang Hasundutan	35	Kab. Bengkulu Tengah
13	Kab. Serdang Bedagai	36	Kab. Pesawaran
14	Kab. Samosir	37	Kab. Pringsewu
15	Kab. Padang Lawas	38	Kab. Mesuji
16	Kab. Padang Lawas Utara	39	Kab. Tulang Bawang Barat
17	Kab. Labuhanbatu Selatan	40	Kab. Bangka Selatan
18	Kab. Labuhanbatu Utara	41	Kab. Bangka Tengah
19	Kab. Nias Barat	42	Kab. Belitung Timur
20	Kab. Pasaman Barat	43	Kota Tanjung Pinang
21	Kab. Dharmasraya	44	Kab. Lingga
22	Kab. Solok Selatan	45	Kab. Kepulauan Anambas
23	Kab. Kepulauan Meranti		

Sumber : Data diolah, 2017

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskripsi dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah laporan realisasi APBD dari tahun 2011-2014 dengan sampel 45 pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Sumatera tahun 2001-2010.

Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari satu variabel independen yaitu Belanja Daerah, dua variabel independen yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum, dan satu variabel *dummy* yaitu *dummy* DAU.

Tabel 4.3
Daftar Pengukuran Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Pengukuran
Independen	Pendapatan Pajak daerah (X1)	Besarnya Pajak dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian pendapatan. Pajak = Pajak daerah + Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi (Pendapatan Bagi Hasil Pajak).
Independen	Dana Alokasi Umum (X2)	Besarnya DAU dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian pendapatan transfer dana perimbangan.
Independen	<i>Dummy</i> DAU (X3)	Nilai DAU yang mengalami perubahan menurun dari tahun sebelumnya 1 dan yang mengalami perubahan menaik dari tahun sebelumnya 0.
Independen	Belanja Daerah (Y)	Besarnya belanja daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian belanja.

Sumber : Data diolah, 2017

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari analisis data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak	180	645,976	99615,124	23916,74706	17006,153328
dau	180	169458,624	824218,824	365870,96865	110492,550053
bd	180	166895,103	1915162,843	605542,97227	236399,801947
Valid N (listwise)	180				

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20*, 2017

Catatan : angka-angka tersebut dinyatakan dalam jutaan rupiah (Rp 000.000)

Misalnya Pendapatan Pajak Daerah (X1) tertinggi adalah Rp 99.615.124.000,-

Dari tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa (dalam jutaan rupiah):

1. Rata-rata dari Pendapatan Pajak Daerah (X1) adalah 23.916,74706 dengan standar deviasi 17.006,153328. Nilai Pendapatan Pajak Daerah (X1) tertinggi adalah 99.615,124 pada Kabupaten Tanjung Pinang di tahun 2013, dan nilai Pendapatan Pajak Daerah (X1) terendah adalah 645,976 pada Kabupaten Mesujidi tahun 2011.
2. Rata-rata dari Dana Alokasi Umum (X2) adalah 365.870,96865 dengan standar deviasi 110.492,550053. Nilai Dana Alokasi Umum (X2) tertinggi adalah 824.218,824 pada Kabupaten Banyuasin di tahun 2014, dan nilai Dana Alokasi Umum (X2) terendah adalah 169.458,624 pada Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2012.
3. Rata-rata dari Belanja Daerah (X3) adalah 605.542,97227 dengan standar deviasi 236.399,801947. Nilai Belanja Daerah (X3) tertinggi adalah 1.915.162,843 pada Kabupaten Banyuasin di tahun 2014, dan nilai Belanja

Daerah (X3) terendah adalah 166.895,103 pada Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2013.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif *Dummy* DAU

ddau				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid naik	175	97,2	97,2	97,2
turun	5	2,8	2,8	100,0
Total	180	100,0	100,0	

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20*, 2017

Dari hasil tabel diatas variabel *dummy* DAU menunjukkan bahwa nilai frekuensi naik muncul sebanyak 175 kali dengan persentase sebanyak 97,2%, sedangkan frekuensi turun muncul sebanyak 5 kali dengan persentase 2,8%.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Uji Normalitas Sebelum Logaritma 10

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		pajak	dau	bd
N		180	180	180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23916,74706	365870,9686	605542,9722
	Std. Deviation	17006,15332	110492,5500	236399,8019
Most Extreme Differences	Absolute	,132	,101	,146
	Positive	,132	,101	,146
	Negative	-,101	-,065	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		1,770	1,360	1,953
Asymp. Sig. (2-tailed)		,004	,050	,001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20*, 2017

Hasil Uji normalitas dengan menggunakan Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (KS) yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan statistik (*2-tailed*). Dari hasil diatas, dapat dilihat nilai dilihat nilai signifikan DAU pajak, DAU, *dummy* DAU (0,004; 0,050; 0,001) < 0,005 artinya data residual tidak terdistribusi secara normal. Oleh karenanya dilakukan tindakan perbaikan yaitu dengan transformasi seluruh variabel penelitian ke dalam fungsi logaritma (log 10). Adapun hasil transformasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Uji Normalitas Setelah logaritma 10

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		lg_pajak	lg_dau	lg_bd
N		180	180	180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4,2738	5,5456	5,7547
	Std. Deviation	,32755	,12278	,15130
	Absolute	,088	,048	,080
Most Extreme Differences	Positive	,053	,048	,080
	Negative	-,088	-,030	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		1,182	,642	1,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,123	,804	,199

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20, 2017*

Dari hasil tes diatas dapat dilihat bahwa tingkat signifikan lg_pajak sebesar 0,123, lg_DAU 0,804, lg_bd sebesar 0,199 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal dan penelitian dapat dilanjutkan dengan alat uji parametrik.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	27650,777	36789,570		,752	,453		
1 pajak	4,736	,692	,341	6,842	,000	,809	1,236
dau	1,256	,107	,587	11,788	,000	,809	1,236
ddau	183208,598	64514,188	,128	2,840	,005	,992	1,008

a. Dependent Variable: bd

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20, 2017*

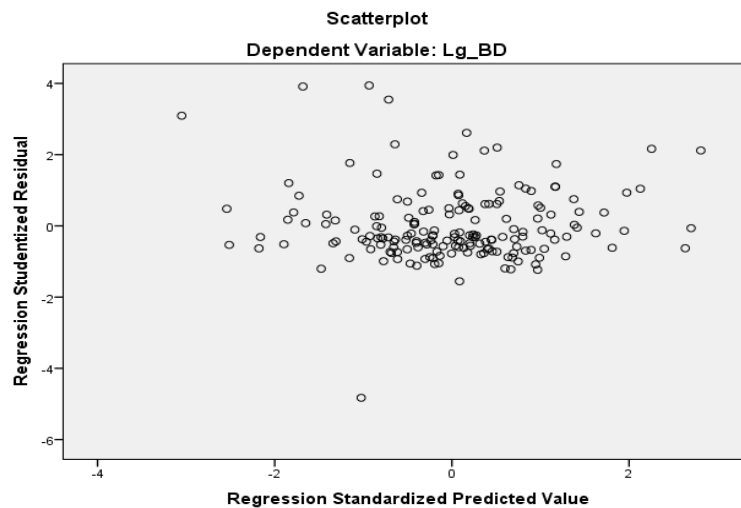
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksiapa tidaknya gejala multikolinieritas adalah dengan melihat besaran korelasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu : $Tol > 0,10$ dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 (Ghozali, 2011).

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diketahui bahwa hasil perhitungannilai tolerance menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah 0,809 dan nilai VIF 1,236, Dana Alokasi Umum 0,809 dan Nilai VIF 1,236, dan Dummy DAU 0,992 dan nilai VIF 1,008. Dimana jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas/tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen dalam penelitian.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20, 2017*

Kesimpulan dari hasil grafik diatas hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Lg_Pajak, Lg_DAU dan Dummy DAU pada gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas/menyebar, titik-titik penyebaran berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model layak digunakan.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,804 ^a	,647	,641	141703,975658	,868

a. Predictors: (Constant), ddau, pajak, dau

b. Dependent Variable: bd

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20, 2017*

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 0,868, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dengan jumlah sampel sebanyak 180 serta jumlah variabel (k) sebanyak 3, maka ditabel Durbin Watson akan didapat nilai dl sebesar 1,7337, du sebesar 1,7786. Dapat diambil kesimpulan bahwa : $dw < 4-du$ yang artinya nilai dw (0,868) lebih kecil dan nilai $4-du$ (2,2663). Maka dapat diambil keputusan tidak menolak penelitian dan tidak ada autokorelasi yang negatif.

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih kekuatan dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah dari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Perhitungan analisis regresi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10
Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37429,943	37351,864		1,002	,318
	pajak	4,881	,704	,351	6,932	,000
	dau	1,234	,108	,577	11,385	,000

a. Dependent Variable: bd

Sumber : Hasil olah data melalui SPSS vers.20, 2017

Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$BD_{it} = \alpha_{0,i} + \alpha_1 \text{Pajak}_{it} + \alpha_2 \text{DAU}_{it}$$

$$BD_{it} = 37429,943 + 4,881 \text{Pajak}_{it} + 1,234 \text{DAU}_{it}$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas terlihat bahwa :

- a) Nilai konstanta α adalah 37.429,943 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X=0$) maka alokasi belanja daerah akan meningkat sebesar 37.429,943.
- b) Nilai koefisien Pajak untuk variabel X1 sebesar 4,881 dan bertanda positif, menyatakan bahwa setiap peningkatan pajak 1% maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 4,881.
- c) Nilai koefisien DAU untuk variabel X2 sebesar 1,234 dan bertanda positif, menyatakan bahwa setiap peningkatan DAU 1% maka akan menaikkan belanja daerah sebesar 1,234.

4.3.2 Pengujian Regresi Linier dengan Variabel *Dummy*: Variabel Independen Periode Berjalan

Hasil dari Uji Regresi Linier Periode Berjalan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Uji Regresi Linier tanpa lag 1

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27650,777	36789,570		,752	,453
	pajak	4,736	,692	,341	6,842	,000
	dau	1,256	,107	,587	11,788	,000
	ddau	183208,598	64514,188	,128	2,840	,005

a. Dependent Variable: bd
Sumber : Hasil olah data melalui SPSS vers.20, 2017

Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$BD_{it} = \alpha_{0,i} + \alpha_1 \text{Pajak}_{it} + \alpha_2 \text{DAU}_{it} + \alpha_3 \text{DDAU}_{it}$$

$$BD_{it} = 27.650,777 + 4,736 \text{Pajak}_{it} + 1,256 \text{DAU}_{it} + 183.208,598 \text{DDAU}_{it}$$

Hasil pengujian tidak menggunakan lag, menunjukkan bahwa nilai koefisien DAU sebesar 0,587 lebih besar dari koefisien pajak senilai 0,341. Hasil ini

menyimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect* pemanfaatan DAU di Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Sumatera karena DAU yang lebih besar daripada Pajak ($0,587 > 0,341$).

4.3.3 Pengujian Regresi Linier dengan Variabel *Dummy*: Variabel Independen Periode Sebelumnya (Lag 1)

Hasil dari Uji Regresi Linier Periode Sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Uji Regresi Linier dengan lag 1

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	282614,039	55836,488		5,061	,000
	Lag_pajak	1,879	1,057	,135	1,778	,077
	Lag_DAU	,748	,163	,349	4,600	,000
	ddau	170797,429	97213,843	,119	1,757	,081

a. Dependent Variable: bd

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20*, 2017

Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$BD_{it} = \alpha_{0,i} + \alpha_1 \text{Pajak}_{it-1} + \alpha_2 \text{DAU}_{it-1} + \alpha_3 \text{DDAU}_{it}$$

$$BD_{it} = 282.614,039 + 1,879 \text{Pajak}_{it-1} + 0,748 \text{DAU}_{it-1} + 170.709,429 \text{DDAU}_{it}$$

Ketika digunakan dengan *lag*, menghasilkan nilai koefisien DAU adalah 0,349 lebih kecil dari DAU tanpa *lag* yaitu sebesar 0,587 demikian pula koefisien Pajak dengan *lag* sebesar 0,135 lebih kecil dari 0,341. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih kecil DAU_t terhadap BD_t . Berarti tidak terjadi *flypaper effect* pada prediksi belanja.

Hasil pengujian membuktikan bahwa terjadi asimetri pada *flypaper effect* karena variabel *dummy* dari signifikan menjadi tidak signifikan pada tingkat α 10% bila

menggunakan *lag*. Nilai koefisien variabel *dummy* dengan arah positif pada pengujian menggunakan *lag*.

4.3.4 Koefisien Determinasi

Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji *R Square*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	,647	,641	141703,975658

a. Predictors: (Constant), ddau, pajak, dau

b. Dependent Variable: bd

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20*, 2017

Nilai *R Square* untuk variabel Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan dummy DAU diperoleh sebesar 0,647. Hal ini berarti bahwa 64,7% dari belanja daerah dan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut sedangkan sisanya sebesar 35,3% dijelaskan oleh variabel lain.

4.3.5 Uji F (Kelayakan model)

Hasil dari uji f dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6469308136345, 356	3	2156436045448,452	107,392	,000 ^b
Residual	3534082942232, 665	176	20080016717,231		
Total	10003391078578, ,021	179			

a. Dependent Variable: bd

b. Predictors: (Constant), ddau, pajak, dau

Sumber : Hasil olah data melalui *SPSS vers.20*, 2017

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil koefisien signifikan menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dengan F hitung sebesar 107,392. Artinya bahwa model layak digunakan untuk penelitian.

4.3.6 Uji t (Uji Independent Sample t-Test)

Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15

Hasil Uji t

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
		F	Sig.	t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
										Lower	Upper
a	Equal variances assumed	3,490	,063	1,040	178	,300	47702,607052	45869,087537	-42814,573669	-	138219,787773
	Unequal variances not assumed			,616	5,112	,564	47702,607052	77473,347942	150141,431595	-	245546,645700

Sumber : Hasil olah data melalui SPSS vers.20, 2017

Berdasarkan Tabel diatas nilai F hitung sebesar 3,490 dan nilai Sig sebesar 0,063. Artinya, karena nilai Signifikan $F > 0,05$ berarti kedua populasi adalah sama (*equity of variance*). Dari hasil tersebut dapat dilanjutkan pada pengujian t, karena sudah terbukti kedua populasi adalah sama.

Berdasarkan Tabel Independent Sample t-Test didapat nilai t_{hitung} sebesar 1,040 dan t_{tabel} sebesar 1,973. Untuk nilai Sig (*2-tailed*) sebesar 0,300. Karena nilai Sig = 0,300 $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis nol diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan antara daerah bernilai DAU yang mengalami perubahan yang menurun.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini menguji hubungan antara variabel bebas (Pajak, DAU, dan *dummy* DAU) terhadap variabel terikat (belanja daerah). Penelitian ini menguji hipotesis dengan dan tanpa variabel *dummy* DAU serta pengujian dengan menggunakan *lag* atau tidak. Adapun kesimpulan hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

H1	Terjadi <i>flypaper effect</i>	Diterima
H2	Terjadi <i>flypaper effect</i> pada prediksi belanja	Ditolak
H3	Terdapat asimetri pada <i>flypaper effect</i>	Diterima
H4	Terdapat perbedaan antara daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU.	Ditolak

Sumber : Hasil olah data, 2017

4.4.1 *Flypaper Effect*

Flypaper effect menurut Maimunah (2006) adalah suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Untuk menentukan apakah yang terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU_t terhadap BD_t dibandingkan dengan efek Pajak_t terhadap BD_t .

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah disajikan, menyatakan bahwa nilai koefisien DAU lebih besar daripada nilai koefisien Pajak. Hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect*, karena sesuai dengan syarat pertama terjadinya *flypaper effect* yaitu bila nilai koefisien DAU lebih besar daripada nilai koefisien Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah merespon lebih banyak atau boros menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri (yang diprosikan dengan Pajak). Dengan demikian hitesis yang menyatakan bahwa terjadi *flypaper effect* diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maimunah (2006) pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada PAD terhadap Belanja Daerah, terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera.

Penelitian ini sesuai dengan kenyataan dilapangan, bahwa besaran belanja Daerah lebih dipengaruhi oleh DAU daripada PAD. Hal ini dikarenakan porsi transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU lebih besar daripada porsi PAD maupun Pajak, dimana jumlah PAD/pajaknya tidak mencukupi untuk membiayai Belanja Daerahnya atau sebagian besar Belanja Daerah dibiayai oleh DAU. Oleh karena itu pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak menggunakan DAU daripada Pajak (Hartati, 2009).

4.4.2 *Flypaper Effect* pada Prediksi Belanja Daerah

Pengujian atas pengaruh DAU dan Pajak terhadap belanja daerah dengan lag yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pada prediksi belanja (Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh DAU_t terhadap BD_t). Dari hasil analisis, peneliti menemukan bahwa nilai koefisien DAU_{t-1} lebih kecil dari nilai koefisien DAU_t . Artinya, prediksi BD_t tidak dipengaruhi nilai DAU_{t-1} dan DAU_t . Hal ini berarti tidak terjadi *flypaper effect* pada prediksi belanja daerah.

Hasil ini berbeda dengan Maimunah dan Akbar (2008) yang menyimpulkan pengaruh pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar dari DAU_t terhadap BD_t . Akan tetapi mendukung penelitian Junaidi (2012) pada pemerintah daerah di Indonesia yang menyatakan bahwa pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih kecil dari DAU_t terhadap BD_t .

Gamkhar dan Oates (1996) dalam Junaidi (2012) meneliti tentang *flypaper effect* pemerintah daerah di Flenish. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa elastisitas belanja daerah berpengaruh signifikan secara berbeda antara Pemda (municipal) yang mengalami kenaikan dengan pemerintah daerah yang mengalami penurunan DAU (*grants*). Ketika terdapat pertumbuhan DAU,

pemerintah daerah membelanjakan belanja daerah melebihi tambahan pendapatannya yang berasal dari DAU. Sebaliknya ketika DAU turun, belanja daerah tidak ikut turun, lalu untuk mendanai belanjanya Pemerintah daerah mengkompensasi penurunan DAU melalui kenaikan Pajak.

Seiring dengan masih seringnya terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi mengenai besarnya jumlah DAU yang akan direalisasi mengakibatkan pemerintah daerah sering menggunakan dasar realisasi DAU tahun sebelumnya dalam penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

4.4.3 Asimetri pada *Flypaper Effect*

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel *dummy* perubahan nilai DAU meningkat dengan perubahan nilai DAU menurun terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa variabel *dummy* dari signifikan menjadi tidak signifikan dengan arah positif pada tingkat α 10% bila menggunakan *lag*. Berarti terjadi asimetri pada *flypaper effect*.

Belanja pemerintah daerah berdasarkan pengamatan empiris terlalu empiris terlalu responsif atas kenaikan DAU, dibanding kenaikan PAD terutama pajak daerah. Pemerintah daerah penerima DAU bereaksi secara asimetri atas peningkatan nilai DAU yang diterima. Bila DAU meningkat dari tahun sebelumnya mendorong pemerintah daerah melakukan belanja daerah lebih besar dari kenaikan DAU, namun bila DAU mengalami penurunan pemerintah daerah tidak berusaha menurunkan kenaikan belanjanya untuk menutupi kekurangan dana belanja, pemerintah daerah berusaha menutupi dengan melakukan peningkatan pendapatan pajak. Artinya peningkatan pemberian DAU dari tahun sebelumnya dapat mengakibatkan Pemerintah daerah kurang maksimal meningkatkan potensi pendapatan pajaknya (Junaidi, 2012).

4.4.4 Pengaruh *Flypaper Effect* pada daerah DAU mengalami peningkatan dan penurunan

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa rata-rata terjadinya *flypaper effect* dengan DAU tinggi tidak terdapat perbedaan dengan rata-rata terjadinya

flypaper effect dengan DAU rendah di Kabupaten/Kota hasil Pemekaran di Sumatera. Dengan demikian hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan DAU, diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian Junaidi (2012), yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara daerah bernilai DAU yang mengalami perubahan yang menaik dengan daerah bernilai DAU yang mengalami perubahan yang menurun.

Flypaper effect mengacu pada suatu kenyataan bahwa pemerintah daerah merespon perubahan belanja secara berbeda tergantung pada apakah perubahan itu terjadi karena peningkatan DAU atau karena peningkatan pendapatan pajak. Gramlich (1987) menemukan bahwa *flypaper effect* terjadi di Negara bagian dan municipal di Amerika Serikat antara tahun 1980-1996. Pemerintah pusat mencoba menurunkan transfer ke Negara bagian dan municipal pada rentang waktu tersebut namun total belanja Negara bagian dan municipal tidak mengalami penurunan. Negara bagian dan municipal berupaya meningkatkan pajak daerahnya untuk menutupi penurunan transfer belanjanya agar belanja daerahnya tidak mengalami penurunan yang diakibatkan penurunan transfer.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji hubungan antara variabel bebas (Pajak, DAU, dan *dummy* DAU) terhadap variabel terikat (belanja daerah). Periode penelitian tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan metode regresi berganda dengan dan tanpa variabel *dummy* DAU serta pengujian dengan menggunakan *lag* atau tidak. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadi *flypaper effect* di Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Sumatera.
2. Tidak terdapat pengaruh *Flypaper Effect* pada Prediksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Sumatera.
3. Terjadi asimetri pada Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Sumatera.
4. Tidak terdapat perbedaan pada daerah yang nilai DAU mengalami perubahan kenaikan dan penurunan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya 45 pemerintahan Kabupaten/Kota hasil pemekaran di Sumatera. Sehingga menyebabkan hasil yang hanya berlaku pada daerah tertentu saja.
2. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel dependen yaitu pendapatan pajak daerah, Dana Alokasi Umum, dan *dummy* DAU.
3. Sedikitnya teori yang dijadikan bahan acuan untuk memperkuat hasil yang didapatkan dari penelitian ini.
4. Tahun penelitian terbatas hanya 4 tahun, yaitu dari 2011-2014.

5.3 Saran

1. Untuk pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerahnya, dan mengelola pendapatannya dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya guna menyejahterakan masyarakatnya.
2. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek yang akan diteliti, agar hasil yang didapat lebih banyak dan akurat. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti daerah luar Sumatera sehingga dapat membandingkan dengan daerah lainnya.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel yang digunakan agar hasilnya lebih akurat.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Kurniawan. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Pulau Sumatera (Periode 2011-2013)*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Amirullah. 2015. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang : Media Nusa Creative.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Theresia Woro Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hendriyani, Ririn Dan Afrizal Tahar. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2015, Hal. 25 – 33. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> diakses tanggal 09 Januari 2017.
- Junaidi. 2012. *Asimetri pada flypaper effect : Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 14, No.1, hal. 45-55.
- Kristiono, Natal. 2015. *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang : Universitas Semarang.
- Kurniawan, Satrya. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)*. Bandar Lampung : IBI Darmajaya.

- Lupiyoadi, Rambat & Ridho Bramulya Ikhsan. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. *Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang : 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya
- Nordiawan, Deddi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pratama, Alan Rizky. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)*. Bandar Lampung : IBI Darmajaya.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan Program IBM SPSS Statistis 19*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sugiono dan Agus Susanto, 2015. *Cara mudah belajar SPSS dan Lisreal*. Bandung : Alfabeta.
- Tenrini, Rita Helbra. 2013. *Pemekaran daerah : kebutuhan atau euforia demokrasi? Menyibak kegagalan pemekaran*. Pkkbn.

Wahyuni, Sri. 2015. *Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Widarjono, Agus. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

_____, *Permendagri No. 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Populasi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Sumatera

No	Nama Kabupaten/Kota	Kriteria 1	Kriteria 2	Sampel
	Prov. Aceh			
1	Kab. Aceh Singkil	x	x	
2	Kab. Bireuen	x	x	
3	Kab. Simeulue	x	x	
4	Kota Langsa	√	√	sampel 1
5	Kota Lhokseumawe	√	√	sampel 2
6	Kab. Gayo Lues	√	√	sampel 3
7	Kab. Aceh Barat Daya	√	√	sampel 4
8	Kab. Aceh Jaya	√	√	sampel 5
9	Kab. Nagan Raya	√	√	sampel 6
10	Kab. Aceh Tamiang	√	√	sampel 7
11	Kab. Bener Meriah	√	√	sampel 8
12	Kab. Pidie Jaya	√	√	sampel 9
13	Kota Subulussalam	√	√	sampel 10
	Prov. Sumatera Utara			
14	Kab. Mandailing Natal	x	x	
15	Kab. Toba Samosir	x	x	
16	Kota Padang Sidempuan	√	x	
17	Kab. Pakpak Bharat	√	√	sampel 11
18	Kab. Nias Selatan	√	x	
19	Kab. Humbang Hasundutan	√	√	sampel 12
20	Kab. Serdang Bedagai	√	√	sampel 13
21	Kab. Samosir	√	√	sampel 14
22	Kab. Batu Bara	√	x	
23	Kab. Padang Lawas	√	√	sampel 15
24	Kab. Padang Lawas Utara	√	√	sampel 16
25	Kab. Labuhanbatu Selatan	√	√	sampel 17
26	Kab. Labuhanbatu Utara	√	√	sampel 18
27	Kab. Nias Utara	√	x	
28	Kab. Nias Barat	√	√	sampel 19
29	Kota Gunung Sitoli	√	x	
	Prov. Sumatera Barat			
30	Kab. Kepulauan Mentawai	x	x	
31	Kota Pariaman	√	x	
32	Kab. Pasaman Barat	√	√	sampel 20

33	Kab. Dharmasraya	√	√	sampel 21
34	Kab. Solok Selatan	√	√	sampel 22
	Prov. Riau			
35	Kab. Kuantan Singingi	x	x	
36	Kab. Pelalawan	x	x	
37	Kab. Rokan Hilir	x	x	
38	Kab. Rokan Hulu	x	x	
39	Kab. Siak	x	x	
40	Kota Dumai	x	x	
41	Kab. Kepulauan Meranti	√	√	sampel 23
	Prov. Jambi			
42	Kab. Muaro Jambi	x	x	
43	Kab. Sarolangun	x	x	
44	Kab. Tanjung Jabung Timur	x	x	
45	Kab. Tebo	x	x	
46	Kota Sungai Penuh	√	√	sampel 24
	Prov. Sumatera Selatan			
47	Kota Prabumulih	√	x	
48	Kota Pagar Alam	√	x	
49	Kab. Banyuasin	√	√	sampel 25
50	Kab. Ogan Ilir	√	√	sampel 26
51	Kab. OKU Timur	√	√	sampel 27
52	Kab. OKU Selatan	√	x	
53	Kab. Empat Lawang	√	√	sampel 28
54	Kab. Panukal Abb Lematang Ilir	x	x	
55	Kab. Musi Rawas utara	x	x	
56	Kab. Lubuk Linggau	√	√	sampel 29
	Prov. Bengkulu			
57	Kab. Kaur	√	√	sampel 30
58	Kab. Seluma	√	√	sampel 31
59	Kab. Mukomuko	√	√	sampel 32
60	Kab. Lebong	√	√	sampel 33
61	Kab. Kepahiang	√	√	sampel 34
62	Kab. Bengkulu Tengah	√	√	sampel 35
	Prov. Lampung			
63	Kab. Lampung Barat	x	x	
64	Kab. Lampung Timur	x	x	
65	Kab. Tanggamus	x	x	
66	Kab. Tulang Bawang	x	x	
67	Kab. Way Kanan	x	x	
68	Kota Metro	x	x	

69	Kab. Pesawaran	√	√	sampel 36
70	Kab. Pringsewu	√	√	sampel 37
71	Kab. Mesuji	√	√	sampel 38
72	Kab. Tulang Bawang Barat	√	√	sampel 39
73	Kab. Pesisir Barat	x	x	
	Prov. Bangka Belitung			
74	Kab. Bangka Selatan	√	√	sampel 40
75	Kab. Bangka Tengah	√	√	sampel 41
76	Kab. Bangka Barat	√	x	
77	Kab. Belitung Timur	√	√	sampel 42
	Prov. Kepulauan Riau			
78	Kab. Karimun	x	x	
79	Kab. Natuna	x	x	
80	Kota Batam	x	x	
81	Kota Tanjung Pinang	√	√	sampel 43
82	Kab. Lingga	√	√	sampel 44
83	Kab. Kepulauan Anambas	√	√	sampel 45

Lampiran 2

**Data Pajak, DAU, Dummy DAU dan Belanja Daerah
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun	Pajak Daerah + DBH pajak dari provinsi	Dana alokasi umum	Dummy DAU	Belanja
			X1	X2	X3	Y
1	Kota Langsa	2011	13.377,004	276.338,002	0	427.190,319
		2012	14.236,440	337.337,339	0	426.160,277
		2013	15.397,782	381.240,982	0	545.514,497
		2014	19.669,646	419.767,005	0	729.568,321
2	Kota Lhokseumawe	2011	27.036,099	336.692,780	0	514.082,644
		2012	23.601,296	394.259,998	0	547.688,380
		2013	26.970,502	437.793,850	0	608.103,619
		2014	32.288,657	469.956,588	0	727.480,904
3	Kab. Gayo Lues	2011	10.201,525	291.076,556	0	477.297,117
		2012	13.315,955	329.446,951	0	458.565,126
		2013	14.508,119	374.040,972	0	510.889,242
		2014	15.325,734	403.096,648	0	670.409,515
4	Kab. Aceh Barat Daya	2011	11.484,826	274.904,588	0	384.087,308
		2012	13.186,536	327.572,527	0	519.954,860
		2013	13.043,013	362.624,746	0	523.657,518
		2014	14.221,583	406.138,315	0	675.330,859
5	Kab. Aceh Jaya	2011	11.309,228	255.320,677	0	413.563,457
		2012	12.806,281	303.438,672	0	408.949,506
		2013	13.706,170	341.773,459	0	472.129,590
		2014	19.132,259	382.101,138	0	667.187,732
6	Kab. Nagan Raya	2011	14.774,017	330.987,205	0	503.348,658
		2012	16.670,336	396.983,251	0	504.754,414
		2013	17.666,449	464.191,402	0	619.301,767
		2014	21.926,091	500.941,291	0	898.786,109
7	Kab. Aceh Tamiang	2011	15.247,716	304.629,955	0	524.305,423
		2012	16.361,382	403.238,538	0	565.544,654
		2013	9.921,003	423.677,588	0	628.348,551
		2014	22.600,982	467.034,124	0	897.491,136
8	Kab. Bener Meriah	2011	30.844,195	285.406,103	0	432.940,294
		2012	1.612,425	332.475,834	0	448.100,090
		2013	10.998,894	375.310,917	0	486.868,608
		2014	12.759,573	410.897,128	0	707.548,249
9	Kab. Pidie Jaya	2011	3.618,743	273.585,671	0	430.246,211
		2012	3.804,132	307.809,690	0	391.905,652
		2013	12.883,535	350.574,172	0	469.025,176
		2014	15.126,728	391.789,535	0	639.948,617

10	Kota Subulussalam	2011	10.827,345	181.919,378	0	304.783,422
		2012	9.849,435	225.256,530	0	292.902,595
		2013	10.857,184	251.634,726	0	340.896,635
		2014	12.126,074	278.513,125	0	451.404,157
11	Kab. Pakpak Bharat	2011	3.210,956	198.239,174	0	318.568,754
		2012	3.268,462	232.990,274	0	296.703,055
		2013	3.314,948	273.598,951	0	381.852,027
		2014	3.631,178	313.591,345	0	416.527,377
12	Kab. Humbang Hasundutan	2011	10.904,163	313.431,176	0	432.517,403
		2012	8.267,737	376.847,178	0	511.537,854
		2013	8.775,391	440.919,622	0	605.789,788
		2014	16.047,826	486.879,858	0	700.844,956
13	Kab. Serdang Bedagai	2011	40.411,622	458.160,308	0	731.773,294
		2012	31.794,253	554.245,457	0	830.317,734
		2013	34.077,819	628.900,240	0	979.791,936
		2014	90.841,215	698.412,747	0	1.007.282,201
14	Kab. Samosir	2011	11.674,524	282.988,294	0	419.708,903
		2012	8.523,859	331.412,601	0	400.830,597
		2013	10.493,834	384.760,680	0	506.371,859
		2014	16.650,196	441.619,455	0	552.483,016
15	Kab. Padang Lawas	2011	15.619,653	249.496,791	0	416.234,576
		2012	9.247,216	331.754,392	0	439.833,950
		2013	11.710,204	371.650,111	0	504.166,350
		2014	28.043,501	408.043,834	0	512.166,208
16	Kab. Padang Lawas Utara	2011	15.943,330	262.539,422	0	453.839,538
		2012	12.450,968	348.056,278	0	571.471,637
		2013	5.338,504	244.257,363	1	166.895,103
		2014	20.612,617	418.726,923	0	588.450,005
17	Kab. Labuhanbatu Selatan	2011	22.968,627	266.922,749	0	429.131,382
		2012	16.618,601	334.512,284	0	438.876,267
		2013	21.526,021	400.566,653	0	720.349,638
		2014	54.663,092	450.151,264	0	664.847,085
18	Kab. Labuhanbatu Utara	2011	22.233,716	346.684,689	0	528.499,512
		2012	16.569,950	400.601,985	0	665.840,020
		2013	17.539,915	457.714,720	0	766.421,207
		2014	38.595,897	503.053,678	0	752.935,181
19	Kab. Nias Barat	2011	3.613,085	193.616,447	0	257.179,695
		2012	3.435,602	227.860,916	0	275.441,232
		2013	3.970,367	251.631,634	0	358.734,130
		2014	3.752,356	279.674,672	0	370.809,894
20	Kab. Pasaman Barat	2011	27.562,763	437.992,675	0	556.935,609
		2012	25.683,732	457.694,684	0	659.236,017
		2013	27.825,152	523.534,850	0	712.977,470
		2014	50.711,737	580.406,954	0	807.964,932
21	Kab. Dharmasraya	2011	33.140,184	297.587,683	0	478.220,636
		2012	32.509,968	351.295,616	0	528.342,614
		2013	33.657,630	400.374,128	0	560.486,201
		2014	40.020,168	445.128,176	0	652.470,660

22	Kab. Solok Selatan	2011	24.996,898	264.086,203	0	396.297,321
		2012	23.904,595	315.024,093	0	487.389,725
		2013	26.010,581	351.505,736	0	530.578,741
		2014	32.717,538	406.540,345	0	578.477,702
23	Kab. Meranti	2011	26.534,600	240.293,822	0	792.074,629
		2012	32.306,188	302.110,630	0	886.990,875
		2013	35.767,171	342.086,718	0	1.002.663,393
		2014	88.497,749	371.269,172	0	1.142.706,935
24	Kota Sungai Penuh	2011	13.266,824	257.556,166	0	397.258,492
		2012	19.149,758	295.529,443	0	464.215,014
		2013	23.353,769	344.517,814	0	558.830,515
		2014	35.388,210	365.298,130	0	554.864,772
25	Kab. Banyuasin	2011	34.509,449	539.128,370	0	971.872,029
		2012	54.868,687	651.357,692	0	1.266.893,795
		2013	37.637,109	772.464,315	0	1.668.919,630
		2014	67.915,851	824.218,824	0	1.915.162,843
26	Kab. Ogan Ilir	2011	25.422,704	362.883,856	0	569.465,405
		2012	37.245,969	446.518,667	0	832.477,597
		2013	11.103,906	520.287,726	0	1.057.783,918
		2014	22.341,913	561.376,933	0	990.876,681
27	Kab. OKU Timur	2011	33.278,301	456.561,500	0	838.947,276
		2012	37.153,292	541.448,924	0	912.984,895
		2013	38.055,662	680.713,525	0	1.186.180,346
		2014	39.994,701	680.713,525	1	1.161.250,219
28	Kab. Empat Lawang	2011	21.141,859	238.262,247	0	483.950,561
		2012	23.602,713	274.671,065	0	514.634,512
		2013	18.074,590	308.418,229	0	637.702,749
		2014	20.087,637	360.871,981	0	801.818,286
29	Kota Lubuk Linggau	2011	32.409,738	267.637,215	0	585.560,371
		2012	35.258,256	328.281,811	0	632.594,859
		2013	33.279,382	377.966,605	0	815.366,376
		2014	37.243,283	414.757,867	0	896.993,166
30	Kab. Kaur	2011	8.634,930	248.742,460	0	355.460,934
		2012	12.392,291	301.076,661	0	416.397,339
		2013	11.493,616	329.881,353	0	467.213,858
		2014	16.732,511	371.883,436	0	534.128,441
31	Kab.Seluma	2011	13.329,933	286.760,124	0	436.143,807
		2012	22.177,101	349.783,377	0	411.675,204
		2013	24.804,684	397.769,115	0	548.165,592
		2014	28.308,077	444.698,984	0	679.385,257
32	Kab. Mukomuko	2011	13.033,016	281.889,471	0	370.649,719
		2012	17.970,855	338.203,452	0	454.626,743
		2013	5.878,408	404.397,726	0	577.069,356
		2014	27.449,658	454.993,409	0	609.328,887
33	Kab. Lebong	2011	8.937,811	249.640,579	0	362.944,155
		2012	11.703,892	312.273,768	0	391.834,088
		2013	10.916,211	332.487,823	0	453.004,112
		2014	18.073,134	373.700,225	0	529.956,532

34	Kab. Kepahiang	2011	11.344,023	264.545,031	0	398.351,740
		2012	15.241,178	317.102,587	0	398.407,611
		2013	14.224,429	357.903,449	0	462.747,721
		2014	19.488,963	402.021,565	0	553.600,633
35	Kab. Bengkulu Tengah	2011	8.796,525	249.976,279	0	412.480,363
		2012	11.488,714	288.875,390	0	407.220,466
		2013	12.107,639	330.693,785	0	478.889,717
		2014	19.982,920	379.669,582	0	538.114,489
36	Kab. Pesawaran	2011	27.546,437	372.577,093	0	570.373,425
		2012	19.402,600	476.870,845	0	672.390,705
		2013	36.645,713	538.309,950	0	822.431,622
		2014	48.141,395	625.845,694	0	930.780,038
37	Kab. Pringsewu	2011	24.670,424	368.176,293	0	577.092,263
		2012	24.670,424	368.176,293	1	577.092,263
		2013	24.606,213	499.454,898	0	772.327,158
		2014	46.898,784	547.622,366	0	840.212,481
38	Kab. Mesuji	2011	645,976	258.071,137	0	477.269,041
		2012	24.169,146	294.053,217	0	437.648,078
		2013	15.959,941	338.570,276	0	478.116,058
		2014	36.496,583	387.694,110	0	518.550,526
39	Kab. Tulang Bawang Barat	2011	22.226,577	284.368,550	0	448.420,180
		2012	26.760,774	323.813,870	0	507.524,839
		2013	20.824,773	380.947,218	0	565.064,132
		2014	40.642,575	424.389,404	0	576.692,368
40	Kab. Bangka Selatan	2011	16.814,992	271.264,342	0	399.275,836
		2012	26.418,784	330.111,851	0	507.746,581
		2013	24.318,312	363.886,920	0	575.034,527
		2014	31.539,457	413.170,287	0	633.342,220
41	Kab. Bangka Tengah	2011	23.403,941	235.206,446	0	426.261,017
		2012	12.875,629	303.044,784	0	568.629,260
		2013	42.358,779	336.873,338	0	587.740,388
		2014	55.370,764	377.712,293	0	622.769,963
42	Kab. Belitung Timur	2011	38.414,311	261.696,542	0	426.290,778
		2012	42.207,400	319.571,051	0	520.000,581
		2013	44.995,910	358.875,317	0	555.260,442
		2014	55.770,147	392.975,926	0	608.468,850
43	Kota Tanjung Pinang	2011	63.681,379	252.589,043	0	699.083,156
		2012	73.890,234	292.026,588	0	745.170,614
		2013	99.615,124	348.778,489	0	823.076,313
		2014	95.682,783	360.587,451	0	990.745,106
44	Kab. Lingga	2011	18.946,669	212.856,954	0	614.748,877
		2012	19.574,632	241.165,424	0	625.904,240
		2013	26.600,146	298.552,154	0	749.632,567
		2014	21.054,847	316.390,446	0	742.644,764
45	Kab. Kepulauan Anambas	2011	9.409,482	208.627,263	0	856.065,418
		2012	27.785,154	169.458,624	1	938.577,500
		2013	19.250,418	233.124,880	0	1.055.392,525
		2014	44.950,012	215.651,064	1	994.389,203

Lampiran 3

1. Analisis Statistik Deskriptif

a. Pajak, DAU dan Belanja Daerah

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pajak	180	645,976	99615,124	23916,74706	17006,153328
dau	180	169458,624	824218,824	365870,96865	110492,550053
bd	180	166895,103	1915162,843	605542,97227	236399,801947
Valid N (listwise)	180				

b. Dummy DAU

Frequencies

ddau

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
naik	175	97,2	97,2	97,2
Valid turun	5	2,8	2,8	100,0
Total	180	100,0	100,0	

2. Analisis Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

1) Sebelum Transformasi Log 10

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pajak	dau	ddau	bd
N		180	180	180	180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23916,74706	365870,96865	,03	605542,97227
	Std. Deviation	17006,153328	110492,550053	,165	236399,801947
Most Extreme Differences	Absolute	,132	,101	,539	,146
	Positive	,132	,101	,539	,146
	Negative	-,101	-,065	-,433	-,101
Kolmogorov-Smirnov Z		1,770	1,360	7,233	1,953
Asymp. Sig. (2-tailed)		,004	,050	,000	,001

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2) Sesudah Transformasi Log 10

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Lg_Pajak	Lg_DAU	ddau	Lg_BD
N		180	180	180	180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4,2738	5,5456	,03	5,7547
	Std. Deviation	,32755	,12278	,165	,15130
Most Extreme Differences	Absolute	,088	,048	,539	,080
	Positive	,053	,048	,539	,080
	Negative	-,088	-,030	-,433	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		1,182	,642	7,233	1,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,123	,804	,000	,199

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

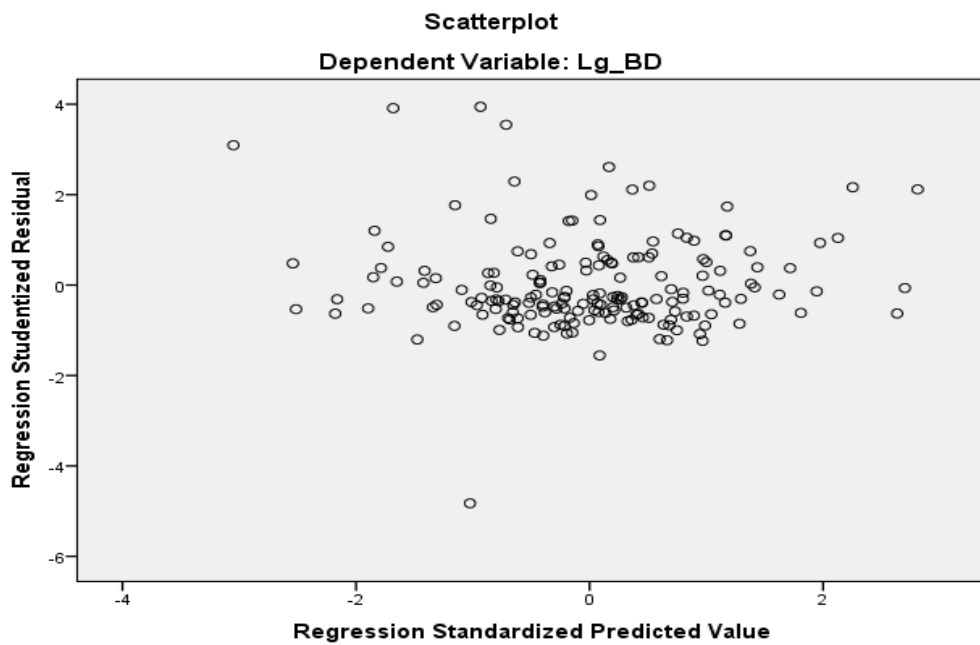
b. Uji Multikolinearitas

Regression

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27650,777	36789,570		,752	,453		
pajak	4,736	,692	,341	6,842	,000	,809	1,236
dau	1,256	,107	,587	11,788	,000	,809	1,236
ddau	183208,598	64514,188	,128	2,840	,005	,992	1,008

a. Dependent Variable: bd

c. Uji Heteroskedastisitas



d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,804 ^a	,647	,641	141703,975658	,868

a. Predictors: (Constant), ddau, pajak, dau

b. Dependent Variable: bd

3. Uji Hipotesis

a. Uji regresi linier berganda

Regression

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37429,943	37351,864		1,002	,318
	pajak	4,881	,704	,351	6,932	,000
	dau	1,234	,108	,577	11,385	,000

a. Dependent Variable: bd

b. Uji regresi linier tanpa lag

Regression

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27650,777	36789,570		,752	,453
	pajak	4,736	,692	,341	6,842	,000
	dau	1,256	,107	,587	11,788	,000
	ddau	183208,598	64514,188	,128	2,840	,005

a. Dependent Variable: bd

c. Uji regresi linier dengan lag

Regression

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	282614,039	55836,488		5,061	,000
lag_Pajak	1,879	1,057	,135	1,778	,077
lag_DAU	,748	,163	,349	4,600	,000
ddau	170797,429	97213,843	,119	1,757	,081

a. Dependent Variable: bd

d. Hasil Uji R Square

Regression

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	,647	,641	141703,975658

a. Predictors: (Constant), ddau, pajak, dau

e. Uji F

Regression

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6469308136345,356	3	2156436045448,452	107,392	,000 ^b
Residual	3534082942232,665	176	20080016717,231		
Total	10003391078578,021	179			

a. Dependent Variable: bd

b. Predictors: (Constant), ddau, pajak, dau

f. Uji t (Uji Independent Sample t-Test)

T-Test

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
								Lower	Upper
Equal variances assumed	3,490	,063	1,040	178	,300	47702,607052	45869,087537	-42814,573669	138219,787773
Equal variances not assumed			,616	5,112	,564	47702,607052	77473,347942	-150141,431595	245546,645700

